

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.G. Subarsono, *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- A.P. Parlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria, Pertanahan Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.
- Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Agustino, Leo., *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Indonesia Press, Jakarta, 2011.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bahtiar Efendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1983.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008.
- Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing, 2013.
- Chadidjah Dalimunthe, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, Medan: FH USU Press, 2000.

- CST. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Dirjdjosiswori, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hans Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, LP3ES, 1982.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2005
- Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti Prakti*, Yogyakarta: Best Publisher, Cet I, 2009
- M. Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Muhammad Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negera*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- S. Rowton Simpson, *Land & Registration*, Cambridge University, 1976.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Suardi, SH, MH, *Hukum Agraria*, Jakarta: Badan Penerbit Alam, 2005
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1981
- T. Yeremias Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional..

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 590/937/14.45/2013 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.